

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konseptual, pemberdayaan merupakan proses memberikan daya atau kekuatan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) untuk meningkatkan kualitas individu dan memperoleh kemampuan dari pihak yang memiliki daya atau kekuasaan (Anwas, 2019:49). Dengan adanya proses pemberdayaan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kualitas diri dan kemandirian yang pada akhirnya tercipta suatu keberdayaan dalam diri individu, sehingga keberdayaan akan membawa masyarakat menuju perubahan kehidupan yang lebih baik. Sebab, pemberdayaan sebagai suatu proses menuju keadaan yang lebih baik dan mengajak masyarakat untuk berdaya saing dalam menjadikan pribadi dan lingkungan yang lebih berpotensi (Hutagalung, 2022:21)

Dalam kegiatan pemberdayaan, memberikan kekuatan (*power*) kepada orang yang kurang mampu atau miskin (*powerless*) merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, perlunya dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam pelaksanaan program pemberdayaan (Hamid, 2018:9). Banyak diantaranya program pemberdayaan masyarakat melibatkan pihak yang lemah yakni keluarga miskin sebagai sasaran pemberdayaan melalui proses pemberian daya oleh pihak yang memiliki kekuasaan yakni pemerintah. Secara umum, program pemberdayaan masyarakat yang banyak dikenal merupakan program yang berupaya dalam mengurangi kemiskinan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dikarenakan permasalahan kemiskinan

di Indonesia masih menjadi permasalahan yang krusial untuk terus diatasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Secara umum, kemiskinan merupakan bentuk ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pokok sehingga berada dalam kondisi kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidupnya (Suryawati, 2004:122). Ketidakmampuan tersebut ditandai dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standart hidup rata-rata masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi hal serius untuk terus diupayakan, sebab Pemerintah Indonesia sadar bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dengan data jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Indonesia (Juta Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin
2019	266,9	24,79	9,28%
2020	270,2	27,55	10,19%
2021	272,7	26,50	9,71%
2022	275,7	26,36	9,57%
2023	278,6	25,90	9,36%

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Dapat disimpulkan berdasarkan data presentase penduduk miskin di atas, bahwa tingkat kemiskinan terjadi peningkatan dan penurunan setiap tahunnya sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang dihadapi. Di tahun 2020, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 27,55 naik 2,76 juta jiwa dari angka kemiskinan di tahun 2019.

Kenaikan angka kemiskinan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka kemiskinan melonjak. Kemudian di tahun 2021 Pemerintah Indonesia mengupayakan pemulihan ekonomi dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan sampai dengan tahun 2023. Perubahan dan perkembangan permasalahan kemiskinan umumnya menjadi sebab dan akibat dari adanya permasalahan pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya tingkat kesejahteraan, sehingga pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia sampai saat ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan bahwa salah satu strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat dilalui dengan meningkatkan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin, yang mana dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pernyataan Hamid (2018:41) yang menyatakan bahwa penuntasan atau penanggulangan kemiskinan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dikarenakan dalam kegiatan pemberdayaan mampu mendorong dan meningkatkan semua potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Maka, program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan dengan tujuan menciptakan kemandirian keluarga miskin demi memperoleh kesejahteraan diatas kekuatannya sendiri.

Program pemberdayaan masyarakat yang telah diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Program Padat Karya. Sejak tahun 2015, Presiden Joko Widodo menginstruksikan program Padat Karya untuk direalisasikan di setiap wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran dan mengentas angka kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Program Padat Karya sebagai salah satu langkah untuk mencegah semakin banyaknya pengangguran di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang dilanda gejolak (Praditya, 2015). Dalam hal ini, program Padat Karya dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin yang belum mempunyai pekerjaan sehingga kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dapat terpenuhi. Untuk mencapai hal tersebut, perlunya peran pemerintah daerah dalam merealisasikan program Padat Karya serta partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Kota Surabaya merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak di Provinsi Jawa Timur. Setiap tahunnya Kota Surabaya mengalami peningkatan jumlah penduduk yang mana peningkatan jumlah penduduk tidak lepas dari meningkatnya angka kemiskinan di Kota Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dengan data berikut ini :

Tabel 1.2 Data Presentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin
2018	288,5	140,81	4,88 %
2019	289,6	130,55	4,51 %
2020	287,4	145,67	5,02 %

2021	288,2	152,49	5,23 %
2022	288,7	138,21	4,72 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan bersamaan dengan jumlah penduduk miskin yang mana tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya. Melonjaknya jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya ditahun 2020 dilatarbelakangi oleh lemahnya ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan dasar yang sesuai dengan standart rata-rata masyarakat. Sehingga Kota Surabaya cukup banyak memiliki masyarakat yang berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam hal ini, upaya pemulihan ekonomi sekaligus pengentasan angka kemiskinan menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya.

Upaya dalam mengentas angka kemiskinan di Kota Surabaya dilakukan melalui intervensi bantuan. Agar intervensi yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya tepat sasaran, data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) digunakan sebagai acuan intervensi bantuan. Adapun data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Surabaya Tahun 2019-2020 sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Data Warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kota Surabaya Tahun 2019 - 2022**

Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
2019	799.540 Jiwa	325.266 KK
2020	820.712 Jiwa	258.485 KK
2021	971.659 Jiwa	310.860 KK
2022	1.085.588 Jiwa	383.208 KK

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah tersebut berpengaruh pada banyaknya intervensi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada warga yang berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Intervensi bantuan yang diberikan meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, pemberdayaan maupun ketenagakerjaan. Intervensi bantuan diberbagai bidang menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya berupaya dalam menanggulangi kemiskinan baik melalui pemenuhan dan penjaminan kebutuhan dasar maupun upaya memberdayakan masyarakat guna mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri. Sebab program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif jika kurang dibangunnya ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin dalam memberdayakan dirinya (Taufiq, 2016:50). Maka, tidak hanya bantuan yang diberikan melainkan upaya pemberdayaan menjadi salah satu tugas Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk dukungan yang nyata kepada masyarakat miskin.

Upaya pemberdayaan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui rangkaian Program Padat Karya. Program Padat Karya merupakan kegiatan pembangunan yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta berdampak pada meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat miskin di Kota Surabaya. Sejak 25 Maret 2022 secara resmi program Padat Karya baru direalisasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai langkah mendongkrak perekonomian masyarakat Kota Surabaya.

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya, menyebutkan bahwa sasaran program Padat Karya adalah mendayagunakan tenaga kerja lokal terutama keluarga miskin dalam berbagai bentuk pelaksanaan program Padat Karya. Maka, sasaran program Padat Karya yang sebelumnya diprioritaskan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diarahkan kepada masyarakat yang terdaftar pada keluarga miskin (Gamis). Pemerintah Kota Surabaya mengganti istilah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk merujuk pada kondisi warga yang kurang mampu agar tidak ada salah persepsi soal keluarga miskin di Kota Surabaya (Sholahuddin, 2022). Perubahan istilah menjadi Keluarga Miskin (Gamis) juga dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan kurang tepat sasaran intervensi bantuan maupun program pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga sasaran program Padat Karya dikhususkan untuk keluarga miskin agar lebih merata dan tepat sasaran.

Keluarga Miskin (Gamis) merupakan keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sementara garis kemiskinan di Kota Surabaya tahun 2023 sebesar Rp. 718.370 perbulan (BPS Kota Surabaya, 2023). Berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelohan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin juga menjelaskan data masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan atau terdaftar sebagai keluarga miskin memiliki hak dalam mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya baik berupa bantuan maupun program pemberdayaan sesuai dengan kriteria keluarga

miskin. Berikut merupakan data jumlah Keluarga Miskin (Gamis) tiap Kecamatan Kota Surabaya di Bulan Januari hingga September 2023 :

**Tabel 1.4 Jumlah Keluarga Miskin Di 31 Kecamatan Kota Surabaya
Bulan Januari – September 2023**

No.	Kecamatan	Januari	September
1.	Asemrowo	4.456	3.607
2.	Benowo	685	816
3.	Bubutan	5.658	4.253
4.	Bulak	3.324	1.486
5.	Dukuh pakis	6.550	3.154
6.	Gayungan	1.092	689
7.	Genteng	7.240	4.429
8.	Gubeng	12.547	9.613
9.	Gunung anyar	1.255	968
10.	Jambangan	2.079	1.853
11.	Karang pilang	5.650	6.074
12.	Kenjeran	7.776	5.745
13.	Krembangan	9.481	11.512
14.	Lakarsantri	765	1.041
15.	Mulyorejo	4.140	2.468
16.	Pabean cantian	6.094	10.487
17.	Pakal	1.601	1.542
18.	Rungkut	2.685	1.462
19.	Sambikerep	5.487	4.628
20.	Sawahan	10.258	13.321
21.	Semampir	14.782	15.321
22.	Simokerto	10.846	9.686
23.	Sukolilo	6.810	4.365
24.	Sukomanunggal	15.242	3.410
25.	Tambaksari	31.036	19.654
26.	Tandes	2.219	1.733
27.	Tegal sari	10.051	10.882
28.	Tenggilis mejoyo	2.504	1.526
29.	Wiyung	3.009	1.328
30.	Wonocolo	6.990	5.509
31.	Wonokromo	17.115	11.937
TOTAL		214.342	174.518

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah keluarga miskin di tahun 2023 sampai dengan September sebanyak 174.518 keluarga miskin. Jika dibandingkan dengan bulan Januari hingga September 2023 terjadi penurunan jumlah keluarga miskin yang cukup signifikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi keluarga miskin melalui berbagai bentuk program Padat Karya yang telah direalisasikan sampai saat ini. Untuk itu, Padat Karya sebagai program ekonomi kerakyatan menjadi kunci utama keberhasilan Surabaya dalam membangkitkan ekonomi yang sempat terpuruk di masa pandemi Covid-19 (Azizah, 2022). Dengan adanya program Padat Karya menjadi salah satu bentuk aktivitas pemberdayaan dengan tujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin secara mandiri.

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya, bentuk pelaksanaan program Padat Karya terbagi menjadi dua klasifikasi program Padat Karya, yakni pengadaan barang atau jasa pemerintahan serta pemberdayaan dan/atau pengolahan usaha mikro. Sampai saat ini, program pemberdayaan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Surabaya sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya. Pemberdayaan sebagai alternatif dalam memandirikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Hal tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yakni melalui Program Rumah Padat Karya.

Rumah Padat Karya merupakan bagian dari program Padat Karya yang berupa kegiatan pemberdayaan dan/atau pengolahan usaha mikro dengan memanfaatkan

lahan milik Pemerintah Kota Surabaya untuk dijadikan sebagai lapangan kerja bagi keluarga miskin. Tujuan adanya Program Rumah Padat Karya adalah sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi keluarga miskin di Kota Surabaya melalui pemberian daya dan kesempatan untuk secara mandiri meningkatkan pendapatan melalui hasil pemberdayaan. Untuk mendukung berjalanya usaha pada Rumah Padat Karya, Pemerintah Kota Surabaya memberikan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada setiap usaha di Rumah Padat Karya. Hal tersebut ditujukan untuk mempermudah kelompok usaha dalam mengelolah usaha di Rumah Padat Karya secara mandiri. Program Rumah Padat Karya sampai saat ini terdapat 14 Rumah Padat Karya yang telah didirikan dan tersebar di 14 kecamatan Kota Surabaya. Adapun data sebaran Rumah Padat Karya di Kota Surabaya beserta jenis usaha yang dikembangkan sebagai berikut:

Tabel 1.5 Data Sebaran Rumah Padat Karya Beserta Jenis Usahanya di Kota Surabaya

No.	Kecamatan	Bidang Usaha	Jenis Usaha
1.	Gubeng	Non Pertanian	Cafe, Potong Rambut dan Cuci Motor
2.	Tenggilis Mejoyo		Laundry, Jahit & Permak
3.	Krembangan		Magot dan Budidaya Ikan
4.	Sambikerep		Cafe, Laundry dan Cuci Motor
5.	Benowo		Cuci Mobil & Motor, Cafe serta Laundry
6.	Wonocolo		Jahit Bordir, Cutting Stiker, Cuci Motor dan Service AC
7.	Mulyorejo		Rumah Batik
8.	Tandes		Rumah Jahit (Baju, Tas, Sepatu) dan Sablon
9.	Bubutan		Kapung Batik
10.	Lakarsantri	Pertanian	Ternak Ayam dan Ikan Patin Pertanian Jagung dan Padi
11.	Jambangan		Pertanian Jagung Manis, Pepaya, Timun, Kacang Panjang Ternak Ayam

12.	Kenjeran		Pertanian Ketela Pohon, Kangkung, Bayam, Pisang Kepok, Terong, Lombok
13.	Sukolilo		Ternak Ikan Lele dan Nila
14.	Pakal		Ternak Ikan Bandeng

Sumber : Pemerintah Kota Surabaya, 2022

Dari adanya data sebaran Rumah Padat Karya di 14 Kecamatan Kota Surabaya, kecamatan tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga miskin sekaligus mengurangi status keluarga miskin pada wilayahnya. Dengan adanya hal tersebut, keberadaan lahan atau bangunan kosong milik Pemerintah Kota Surabaya menjadi syarat utama dibangunkannya Rumah Padat Karya. Tidak hanya itu saja, pendataan minat dan keinginan masyarakat dalam mengusai bidang usaha yang akan ditekuni harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah kecamatan tersebut sehingga terdapat dua klasifikasi bidang usaha yakni Non Pertanian dan Pertanian. Setelah minat dan keinginan terdata serta dipilih secara mayoritas, langkah selanjutnya adalah dilakukan pelatihan kerja untuk kelompok usaha Rumah Padat Karya sesuai dengan bidang usaha yang dipilih dan diminati. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki dapat membantu kelompok usaha dalam menjalankan usaha di Rumah Padat Karya sekaligus terwujudnya kemandirian dalam mendapatkan penghasilan dari hasil kerja di Rumah Padat Karya. Maka, Rumah Padat Karya di 14 Kecamatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin secara mandiri sekaligus sebagai bentuk strategi menanggulangi kemiskinan di Kota Surabaya.

Keberadaan program pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya tak luput dari adanya tantangan dan hambatan yang menghambat tujuan dari program pemberdayaan

masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rangkaian program pemberdayaan secara berkelanjutan serta kurang meratanya kemampuan masyarakat dalam mengelolah usaha secara mandiri. Faktanya, keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif menjadi kunci utama keberhasilan program pemberdayaan. Sebab, hal terpenting dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan adalah terletak pada pelaksanaan proses atau tahapan suatu program pemberdayaan yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi karena masyarakatlah yang paling mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi, kebutuhan dan potensi-potensi yang dimiliki (Hamid, 2018:108). Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat akan timbul kemauan secara sadar akan pentingnya program pemberdayaan guna memperbaiki taraf hidup keluarganya. Hal tersebut terjadi pada Rumah Padat Karya Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.

Rumah Padat Karya Prapen bertempat di Jalan Kyai Abdullah No. 17 Prapen, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 2022. Adanya bangunan kosong yang mana merupakan bangunan bekas Kelurahan Prapen yang sekarang telah dilebur dengan kelurahan Panjang Jiwo menjadi syarat utama dibangunkannya Rumah Padat Karya Prapen. Dalam hal ini, Kecamatan Tenggilis Mejoyo diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya pada keluarga miskin sekaligus mengurangi jumlah keluarga miskin di Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Seperti yang tertulis dalam artikel jatimnet.com.

Jatimnet.com, Surabaya (29 Mei 2022) – Rumah Padat Karya Prapen di Jalan Kyai Abdullah No.17 Prapen, Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dimanfaatkan untuk keluarga miskin Kecamatan Tenggilis Mejoyo melalui unit usaha laundry, jahit dan permak, serta cuci motor. Rumah Padat Karya Prapen telah menyerap puluhan tenaga kerja setiap unit usahanya, diantaranya menyerap 58 tenaga kerja MBR pada unit usaha *laundry* (penatu) yang mana telah bekerja sama dengan Hotel Zest, 40 tenaga kerja pada unit usaha jahit dan permak, serta delapan tenaga kerja pada unit usaha cuci motor. Sehingga Rumah Padat Karya Prapen mampu menyerap 106 tenaga kerja keluarga miskin. <https://jatimnet.com/rumah-padat-karya-prapen-serap-106-tenaga-kerja-mbr> (Diakses tanggal 11 September 2023).

Berdasarkan berita di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan melalui program Rumah Padat Karya di Prapen mampu menyerap 106 tenaga kerja yang berasal dari keluarga miskin di Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada awal peresmian Rumah Padat Karya Prapen yakni 28 Mei 2022. Namun, berdasarkan hasil observasi awal peneliti jumlah keluarga miskin yang mengikuti program Rumah Padat Karya di Prapen hanya sebesar 56 orang yang mana terdiri dari 23 orang yang memiliki minat diunit usaha *Laundry* (penatu) dan 33 orang yang memiliki minat diunit usaha Jahit (Kecamatan Tenggilis Mejoyo, 2022). Jumlah tersebut merupakan jumlah peserta pelatihan usaha Rumah Padat Karya Prapen yang dilaksanakan sejak Bulan April hingga Juni 2022. Harapannya dengan mengikuti pelatihan kerja, peserta pelatihan tersebut menjadi kelompok usaha atau tenaga kerja di Rumah Padat Karya Prapen memiliki rasa tanggungjawab dalam mengelolah dan mengembangkan usaha Rumah Padat Karya Prapen. Akan tetapi, 56 tenaga kerja hanya tersisa sembilan tenaga kerja yang sampai saat ini bekerja di Rumah Padat Karya Prapen yakni terdiri dari empat tenaga kerja diunit usaha penatu (*laundry*) dan lima orang diunit usaha jahit.

Kemunduran tenaga kerja dilatarbelakangi oleh rendahnya kemauan tenaga kerja yang merupakan keluarga miskin Kecamatan Tenggilis Mejoyo untuk bekerja di Rumah Padat Karya Prapen menjadi salah satu hambatan Kecamatan Tenggilis Mejoyo dalam mengurangi jumlah status keluarga miskin di wilayahnya. Selain itu, rendahnya pendapatan setiap bulannya yang didapatkan oleh tenaga kerja di Rumah Padat Karya Prapen belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup keluarganya atau mampu membuat tenaga kerja tersebut lepas dari status keluarga miskin. Hal tersebut didukung oleh data hasil monitoring terkait pendapatan usaha Rumah Padat Karya Prapen di bulan Oktober 2023, sebagai berikut:

**Tabel 1.6 Data Hasil Pendapatan Rumah Padat Karya Prapen
Bulan Oktober 2023**

Usaha Rumah Padat Karya Prapen	Jumlah Pekerja	Rata-Rata Pendapatan Perbulan
<i>Laundry</i> (penatu)	4	±Rp.700.000/orang
Jahit	5	±Rp.50.000/orang

Sumber : Kecamatan Tenggilis Mejoyo, 2023

Berdasarkan data diatas, rata-rata pendapatan yang diperoleh tenaga kerja di Rumah Padat Karya Prapen masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebab, rata-rata pendapatan tenaga kerja Rumah Padat Karya tergantung dari masuknya pelanggan atau pesanan tiap bulan. Dalam hal ini, perkembangan usaha Rumah Padat Karya Prapen yang belum stabil akan mejadi kendala yang menghambat berjalannya serta keberlanjutan usaha Rumah Padat Karya Prapen.

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan di Rumah Padat Karya Prapen menjadi tantangan tersendiri bagi pihak yang melakukan pemberdayaan yakni Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan pihak yang diberdayakan yakni tenaga kerja di

Rumah Padat Karya Prapen. Dari permasalahan tersebut menandakan bahwa keberhasilan mencapai tujuan pemberdayaan jika masyarakat memiliki kemauan, kesadaran dan komitmen dalam mengelolah usaha yang telah diberikan Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan untuk melakukan perubahan hidup menuju kehidupan yang lebih sejahterah. Dalam hal ini, masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki peran penting dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan demi menuju kehidupan yang lebih sejahterah, tetapi harus diimbangi dengan pentingnya peran fasilitator pemberdayaan dalam membangun pemahaman dan komitmen untuk mendorong kemandirian individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan menurut Edi Suharto (2014:67) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan, dan Pemeliharaan. Maka, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Rumah Padat Karya Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat digunakan sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Peneliti kemudian mengemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Rumah Padat Karya Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Rumah Padat Karya Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni dapat dilaksanakannya penelitian kepada berbagai pihak, baik penulis maupun pihak lainnya, terutama kalangan akademis dan masyarakat umum dalam mengetahui pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Rumah Padat Karya Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui program Rumah Padat Karya Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau rekomendasi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam mengkaji pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kebaruan penelitian yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan referensi dan menjadi sumber bacaan di perpustakaan sehingga dapat digunakan untuk dasar pemikiran bagi peneliti yang kemungkinan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

c. Bagi Rumah Padat Karya Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo

Sebagai saran dan masukan untuk bergotong royong menggerakkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan khususnya keluarga miskin yang tergabung dalam Rumah Padat Karya Prapen.